

TERIMA KASIH



021 2557 8300 <https://www.kpk.go.id>
Gedung KPK, Jln. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950

Booklet Hasil Survei Penilaian Integritas 2025

BOOKLET HASIL SPI 2025



DAFTAR ISI

Bagian 1

Pendahuluan

Bagian 2

Demografi

Bagian 3

Potret Integritas
Nasional

Bagian 4

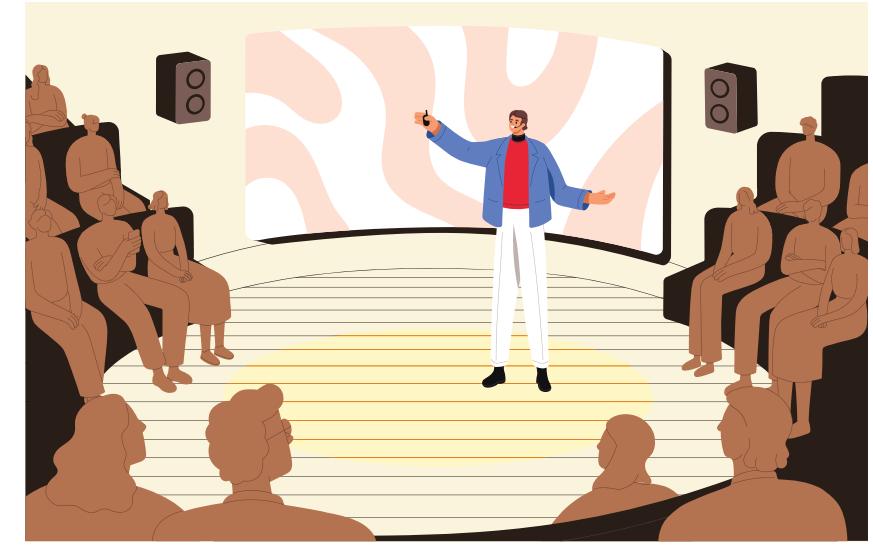
Highlight



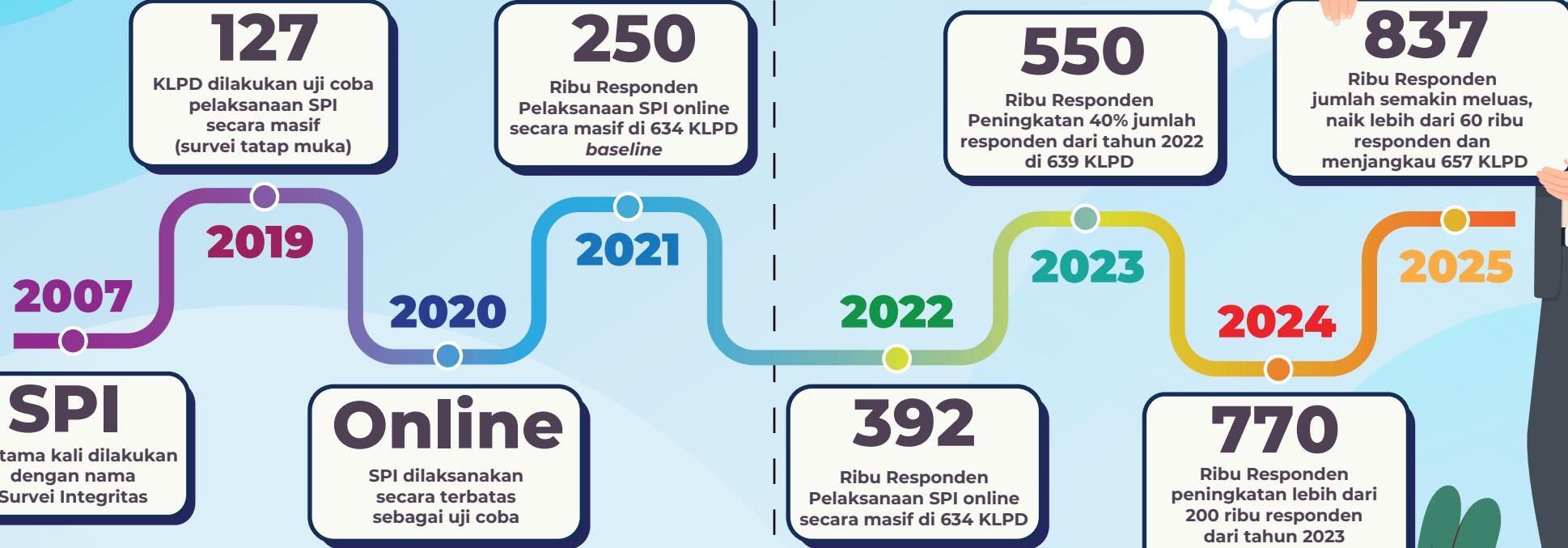
Bagian 1

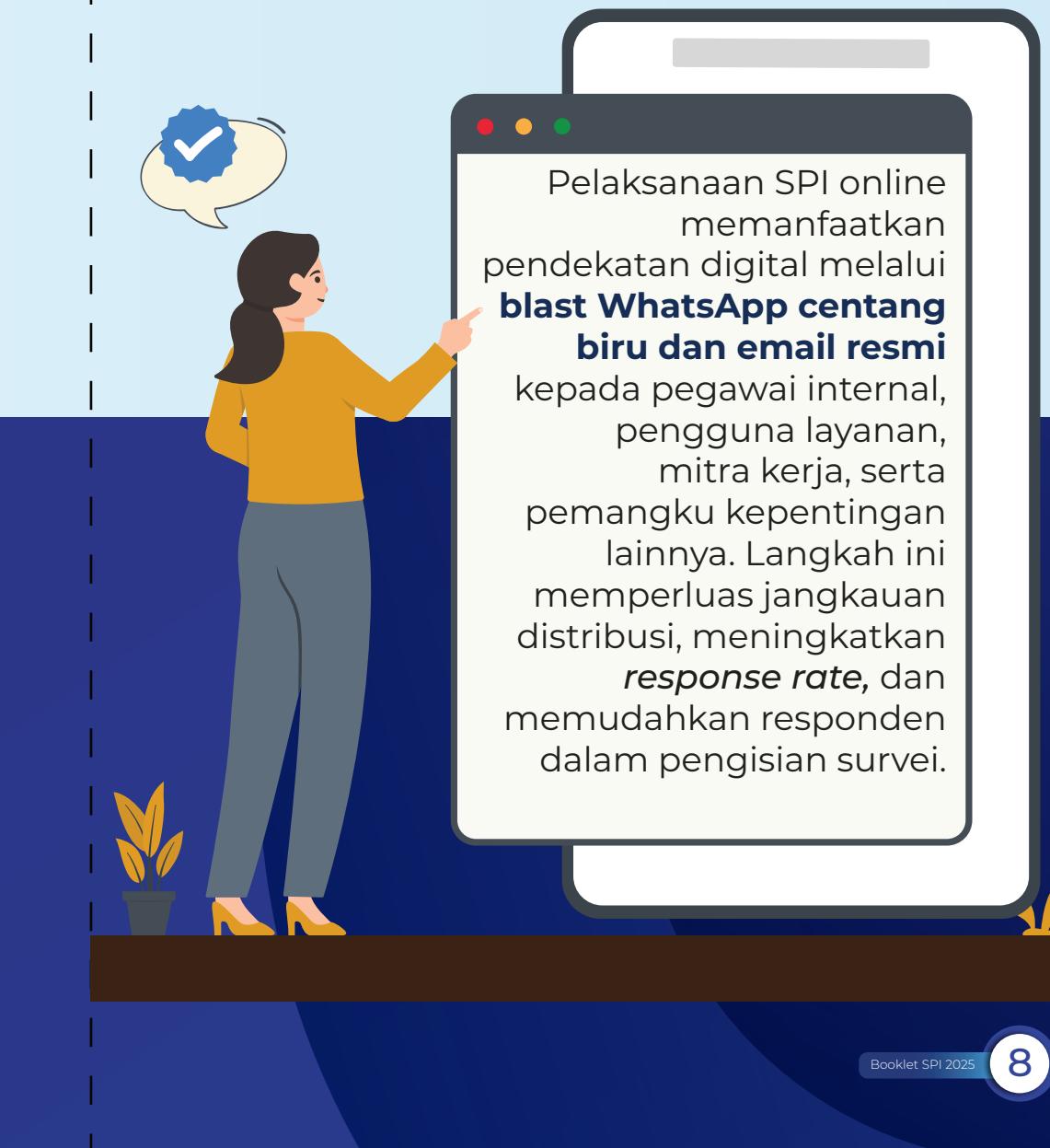
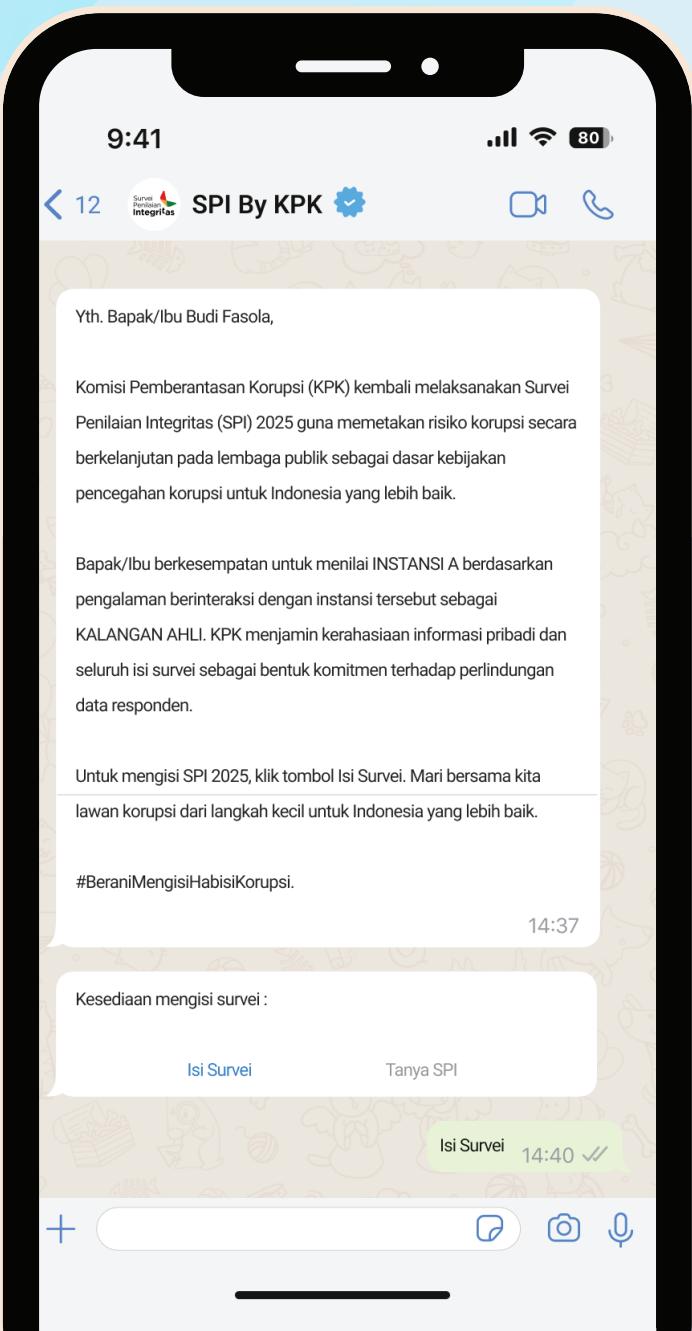
Pendahuluan

• • • •



Perjalanan SPI





Lima poin keunggulan SPI



1. Pengukuran

Kombinasi Persepsi, Pengalaman, dan Data Objektif (faktor koreksi).

2. Sensitivitas

Fokus pada hal-hal terkait pemberantasan korupsi, pemetaan risiko dan praktik korupsi, dan efektivitas kegiatan antikorupsi.

3. Peran Serta

Responden terdiri dari sudut pandang Internal (Pegawai), Eksternal (Penerima manfaat, pengguna layanan, dan Vendor) dan Eksper (Stakeholder atau ahli pemerhati dari KLPD).

4. Perbaikan

Identifikasi prioritas area perbaikan yang rentan korupsi. Hasil SPI memberikan rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti.

5. Transparan

Integritas setiap instansi sejak 2020 - 2025 disampaikan secara transparan melalui JAGA.ID.

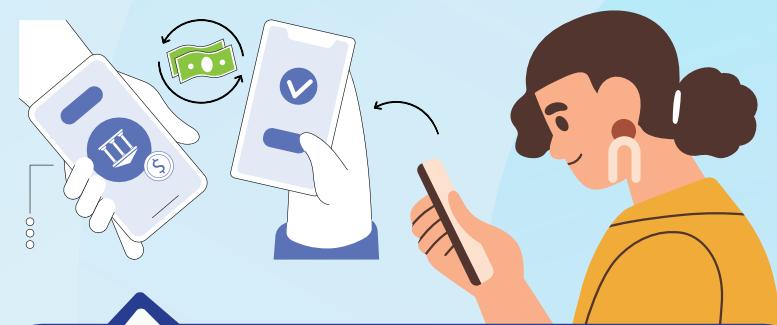
Pemanfaatan SPI



Sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, Indeks Integritas Nasional ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029, serta menjadi Program Prioritas Nasional berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025.



Melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Indeks Integritas Nasional berperan sebagai cermin integritas birokrasi demi memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN.



Sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang berintegritas tinggi, SPI dimanfaatkan sebagai referensi dalam penentuan Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi pemerintah daerah yang menunjukkan progres positif atau berstatus hijau.

SPI Bukan Hanya Alat Ukur, Tapi Katalis Perbaikan.



Ibarat garis meteran, SPI menunjukkan dengan presisi bagian mana yang sudah lurus, mana yang bengkok, dan seberapa jauh perbaikannya harus dilakukan. Namun, yang membuat perubahan itu benar-benar terjadi bukanlah meterannya, melainkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang menjadi proses membenahi rumah: memperkuat pondasi tata kelola, menambal kebocoran integritas, dan merapikan prosedur yang masih rawan.

Tahun 2026 akan menjadi tahun konsolidasi penuh bagi KPK dan seluruh instansi dalam menjalankan tindak lanjut yang lebih fokus, sistematis, dan terukur. Ini menjadi tahun ketika “rumah” yang telah diukur bersama mulai benar-benar direnovasi agar berfungsi lebih baik, lebih transparan, dan lebih tahan terhadap risiko korupsi.

SPI Sebagai Indikator Pengukuran atau Dampak (*Outcomes*)

• • • •



- ▶ 8 Menu Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP)
- ▶ Sosialisasi / Kampanye untuk meningkatkan pemahaman internal dan publik dalam upaya pencegahan korupsi serta penguatan integritas.
- ▶ Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
- ▶ Reformasi Birokrasi
- ▶ Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- ▶ Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Instansi



Individu



Siapa Saja yang Menilai?

.....



Internal

Pegawai di instansi
(ASN maupun non ASN)



Eksternal

Penerima manfaat, penerima layanan,
perijinan, mitra kerjasama, vendor
pengadaan & penunjukan langsung,
dan lainnya



Eksper

Stakeholder/ pemangku kepentingan/
kalangan ahli



Apa Saja yang Dinilai dari SPI?

• • • •

Internal

01.

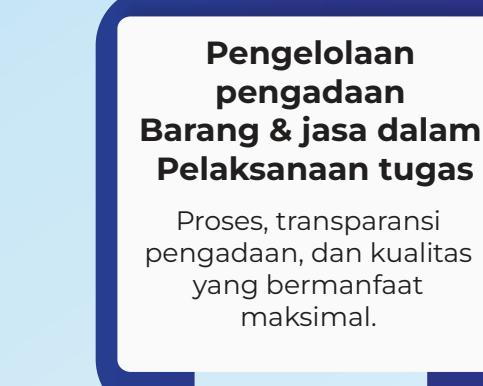
Transparansi

Kemudahan akses, jaminan penindakan korupsi sesuai aturan, serta keteladanan pimpinan.

02.

Integritas dalam Pelaksanaan Tugas

Aturan penggunaan fasilitas, instruksi dalam bekerja, kepatuhan terhadap prosedur, proses rekrutmen, promosi, dan mutasi berbasis merit.



Pengelolaan pengadaan Barang & jasa dalam Pelaksanaan tugas

Proses, transparansi pengadaan, dan kualitas yang bermanfaat maksimal.

03.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Objektivitas promosi dan mutasi yang berbasis kompetensi.



04.



05.

Perdagangan Pengaruh

Proses penentuan program dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan strategis.



06.

Pengelolaan Anggaran

Persepsi dan pengalaman terkait penyalahgunaan anggaran; mulai dari PBJ, perjalanan dinas, honor, hingga anggaran kantor.

07.

Sosialisasi Antikorupsi

Efektivitas sosialisasi, internalisasi, dan kampanye antikorupsi.

Eksternal

• • •

1 ➤ Transparansi dan Keadilan Layanan

Pelayanan sesuai prosedur, adil, dan bebas diskriminasi

2 ➤ Integritas Pegawai

Pencegahan praktik di luar ketentuan dalam pelayanan dan tugas

3 ➤ Upaya Pencegahan Korupsi

Budaya antikorupsi dan kepatuhan di lingkungan kerja



Integritas Instansi

Penguatan integritas, transparansi untuk pencegahan korupsi, objektivitas kebijakan, penerapan pesan antikorupsi, pengawasan dan pendekripsi integritas.



Faktor Koreksi

• • •



Prevalensi Korupsi

Kasus korupsi di instansi

Integritas Pelaksanaan Survei

Kualitas data secara statistik,
surveillance, serta kondisi
intervensi jawaban responden



Partisipasi Instansi dalam Survei Penilaian Integritas



SPI melibatkan 657 Kementerian, Lembaga, BUMN, dan Pemerintah Daerah



48
Kementerian



59
Lembaga



4
BUMN



38
Pemerintah
Provinsi



93
Pemerintah
Kota



415
Pemerintah
Kabupaten

Cluster A

57 Instansi

30 Kementerian
23 Lembaga
4 BUMN

Cluster B

32 Instansi

7 Kementerian
25 Lembaga

Cluster C

22 Instansi

11 Kementerian
11 Lembaga





Statistik Pelaksanaan SPI 2025

Data populasi "clean" yang dikirim ke KPK



5.154.103

Jumlah Responden yang Mengisi Kuesioner SPI



1.022.173

Undangan pengisian survei yang dikirim melalui Whatsapp maupun Email



4.422.120

Jumlah Responden yang Diolah Menjadi Indeks SPI



837.693

Responden dengan jawaban abnormal yang tidak dapat diolah



71.757

Responden tidak memenuhi syarat awal yang ditetapkan dalam SPI



112.723

Internal

561.026

Eksternal

260.895

Eksper

15.772



Response Rate Nasional

18,56%

Response Rate Internal

39,91%

Response Rate Eksternal

6,61%

Response Rate Eksper

42,05%



Mitra SPI

38 Perguruan Tinggi

bekerjasama dengan KPK
untuk studi kualitatif SPI 2025

Tahun ini, SPI menggandeng **38 Perguruan Tinggi** di berbagai provinsi sebagai mitra pelaksana. Kehadiran Perguruan Tinggi memastikan proses studi kualitatif dapat dilakukan lebih dekat dengan konteks lokal, sehingga temuan yang dihasilkan lebih akurat, relevan, dan mencerminkan kondisi di masing-masing daerah. Melalui kolaborasi ini, proses penggalian informasi menjadi lebih menyeluruh karena dilakukan oleh pihak yang memahami dinamika regional, baik dari sisi sosial, budaya, maupun tata kelola layanan publik.

Pelaksanaan SPI diperkuat melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik dan kalangan akademisi yang berperan mempertajam aspek metodologis, sehingga proses pengukuran menjadi lebih terstandar, akurat, dan kredibel. Dengan dukungan keahlian statistik serta kajian ilmiah, setiap temuan SPI tidak hanya kuat secara empiris di lapangan, tetapi juga kokoh secara metodologis.



Key Opinion Leaders (KOL)

Pada SPI 2025, KPK menerapkan strategi komunikasi yang lebih progresif dengan melibatkan **Key Opinion Leaders (KOL)** dan **media partner**. KOL membantu mengemas isu integritas menjadi lebih dekat dan mudah diterima publik, sementara media partner memperluas jangkauan pesan secara konsisten. Kolaborasi ini membuat penyebaran informasi SPI lebih hidup, relevan, dan berdampak. Berikut adalah beberapa KOL yang bekerjasama dengan SPI 2025:



@raymondchins
TikTok
Posted - 23 September 2025



@jovialdalopez
IG Reels
Posted - 23 Oktober 2025



@dzawin_nur
IG Reels
Posted - 10 November 2025



@salsaer
TikTok
Posted - 23 September 2025



@andovidalopez
IG Reels
Posted - 23 Oktober 2025



6 isu prioritas

• • • •

Melalui pendekatan mendalam dengan berbagai pihak terkait—baik melalui wawancara langsung, Focus Group Discussion (FGD), maupun In-depth Interview (IDI), mitra Perguruan Tinggi menggali 6 isu prioritas yang menjadi fokus utama SPI. Pendekatan ini memastikan setiap temuan tidak hanya berdasarkan persepsi, tetapi juga menggambarkan dinamika nyata yang terjadi di daerah. Isu prioritas tersebut meliputi:

- 1. **Integritas Individu dan Kepemimpinan**
- 2. **Intervensi**
- 3. **Pelibatan dan Pengawasan oleh Pegawai dan Masyarakat**
- 4. **Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi**
- 5. **Pengendalian Gratifikasi dan Suap**
- 6. **Transparansi pada Layanan Publik**

Kolaborasi ini dihadirkan untuk menyajikan potret integritas daerah yang jauh lebih utuh, tajam, dan akurat mengenai kondisi integritas dan mendorong rekomendasi perbaikan yang lebih tepat.

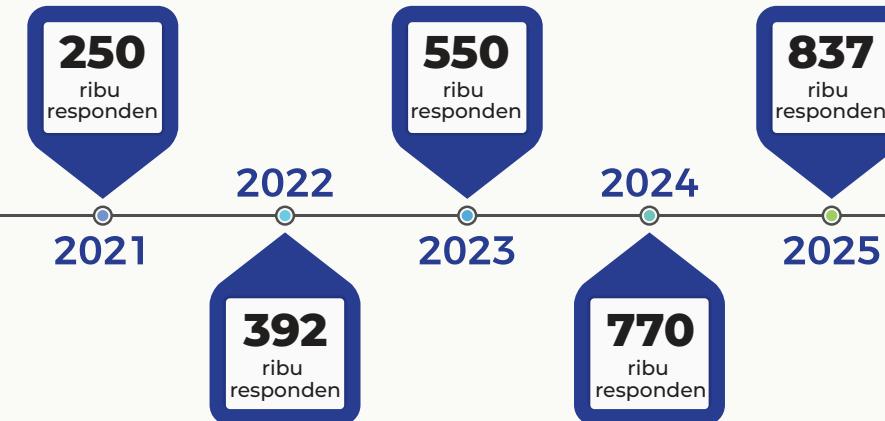


Kabar Baik...



Setiap tahun, jumlah responden SPI terus naik. Itu artinya, semakin banyak pihak yang peduli dan mau turun tangan menjaga integritas di Indonesia. Bahkan jika dibandingkan dengan 2021, jumlah responden melonjak signifikan.

Sebuah Komitmen Bahwa Gerakan Antikorupsi Makin Mendapat Dukungan Luas!



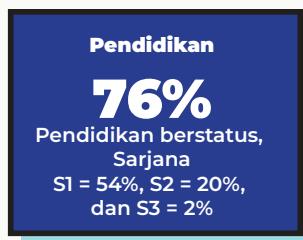
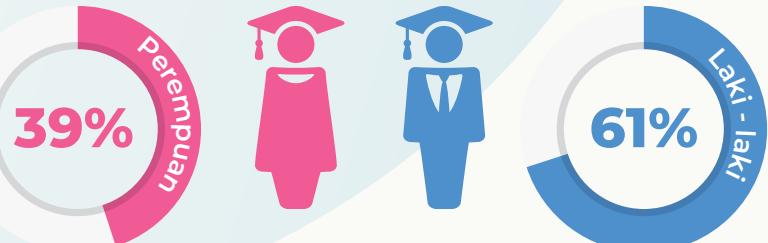
Bagian 2

Demografi

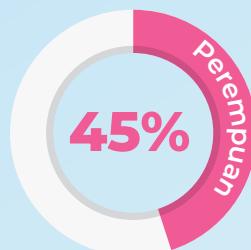


Demografi

Internal



Eksternal



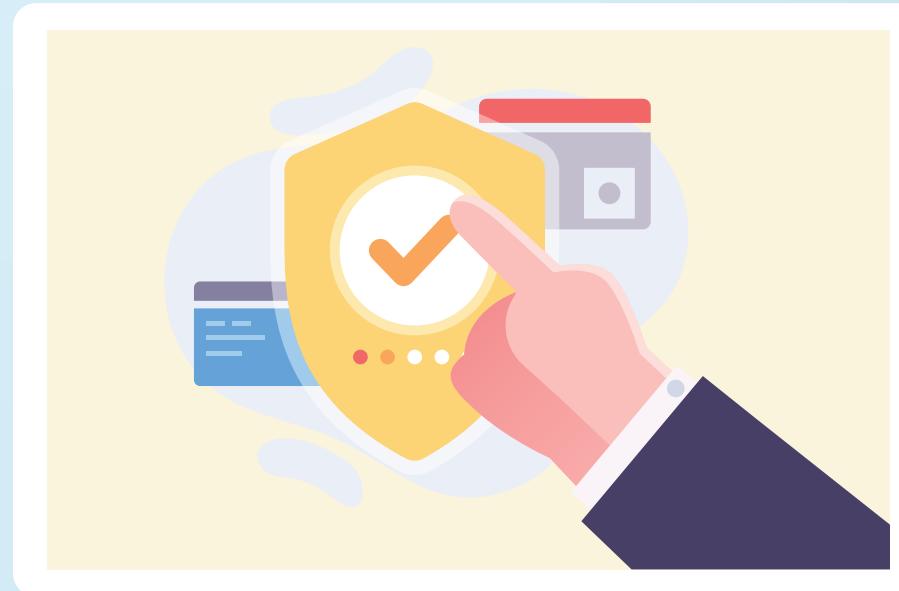
Eksper



Bagian 3

Potret Integritas Nasional

• • •



Potret Integritas Nasional 2025

• • • •

Potret Integritas Nasional (I)

Kategori:

Rentan
(<73.00)

Waspada
(≥73.00 sampai <78.00)

Terjaga
(≥78.00)



Skala Integritas per Instansi

Rentan
(<73.00)

Waspada
(≥73.00 sampai <78.00)

Terjaga
(≥78.00)

Pemerintah Kabupaten dan Kota

82.26 **Tertinggi**
Pemerintah Kota Madiun

54.09 **Terendah**
Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya

Pemerintah Provinsi

79.41 **Tertinggi**
Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta

60.15 **Terendah**
Pemerintah Provinsi Papua Barat

Kementerian & Lembaga

83.76 **Tertinggi**
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

63.55 **Terendah**
Mahkamah Agung

BUMN

79.71 **Tertinggi**
Bank Tabungan Negara

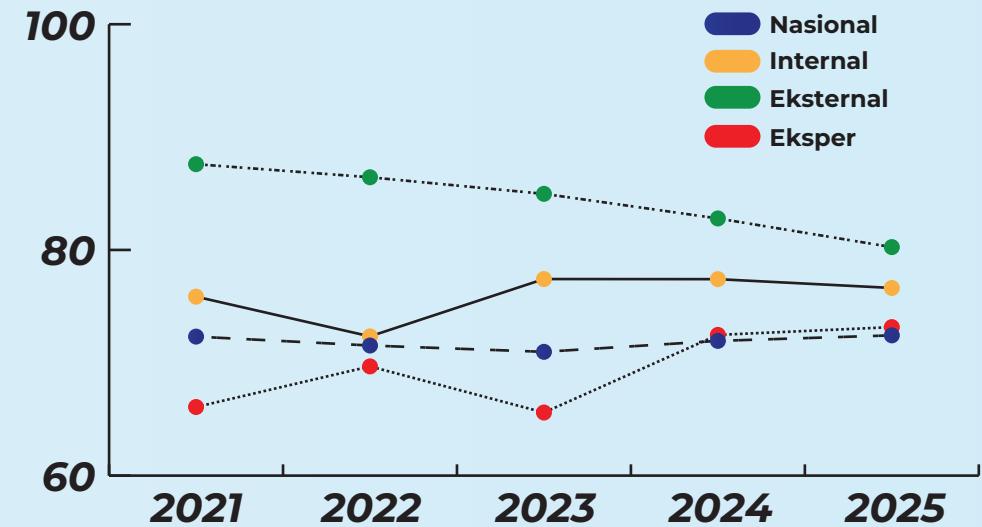
67.96 **Terendah**
Bank Rakyat Indonesia

Pelacakan Indeks Integritas Nasional, Internal, Eksternal, Eksper

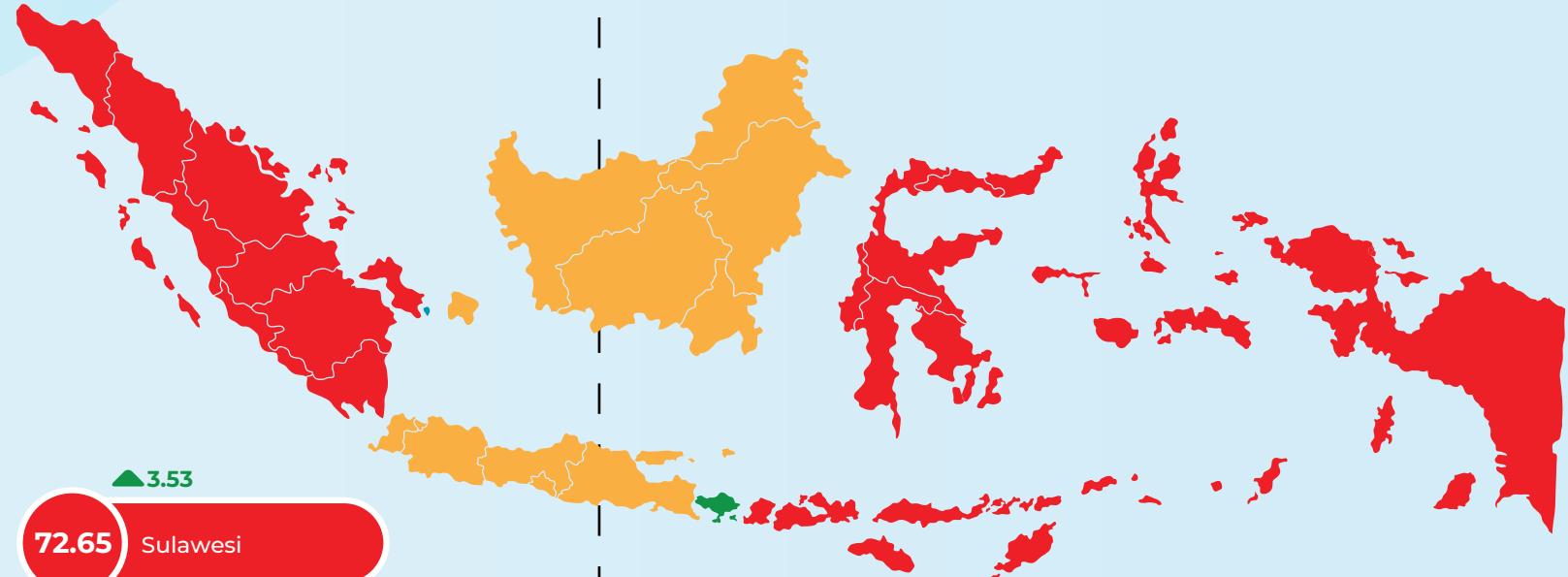
• • •



Selama lima tahun berturut-turut,
Indeks Integritas Nasional tidak
pernah beranjak dari zona *rentan*



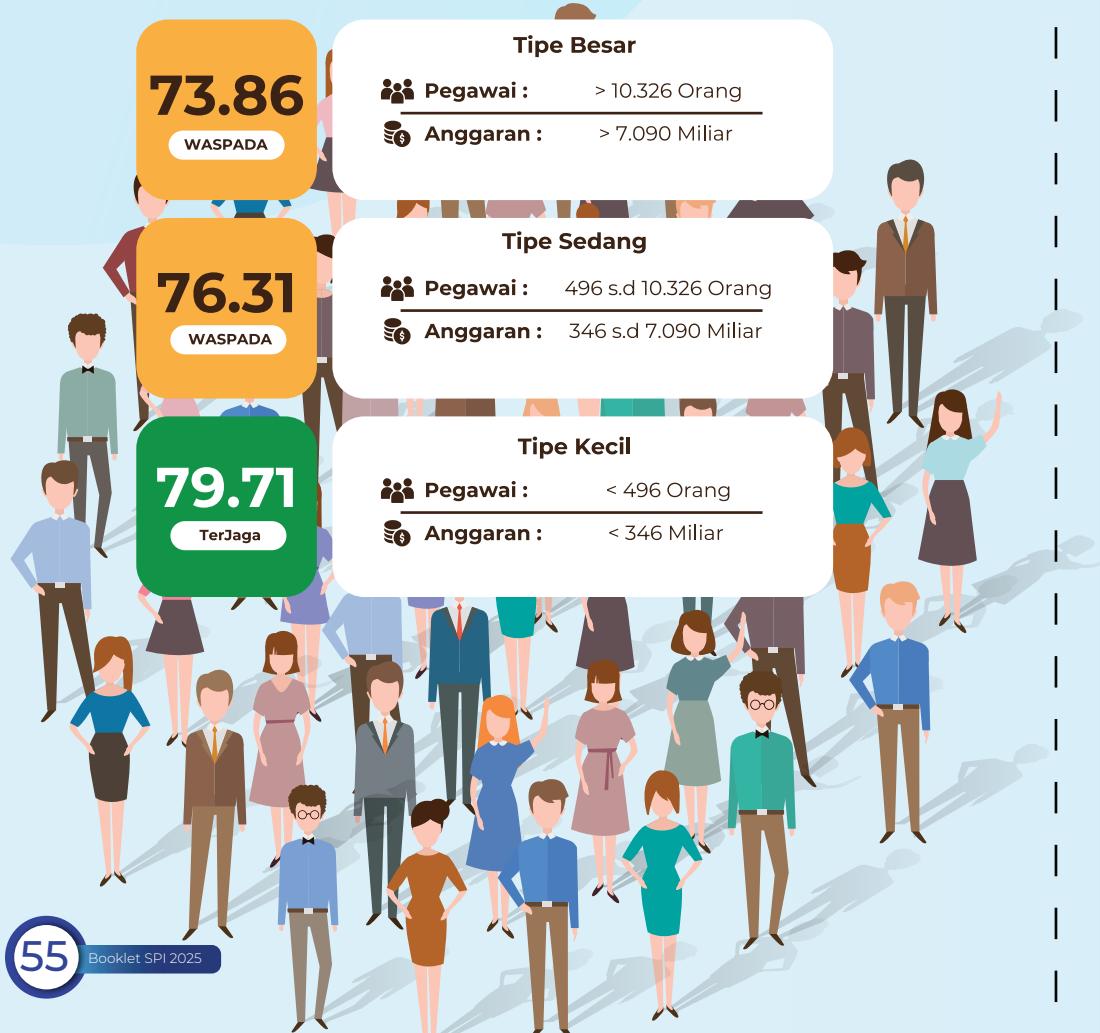
Indeks Integritas Wilayah di Indonesia



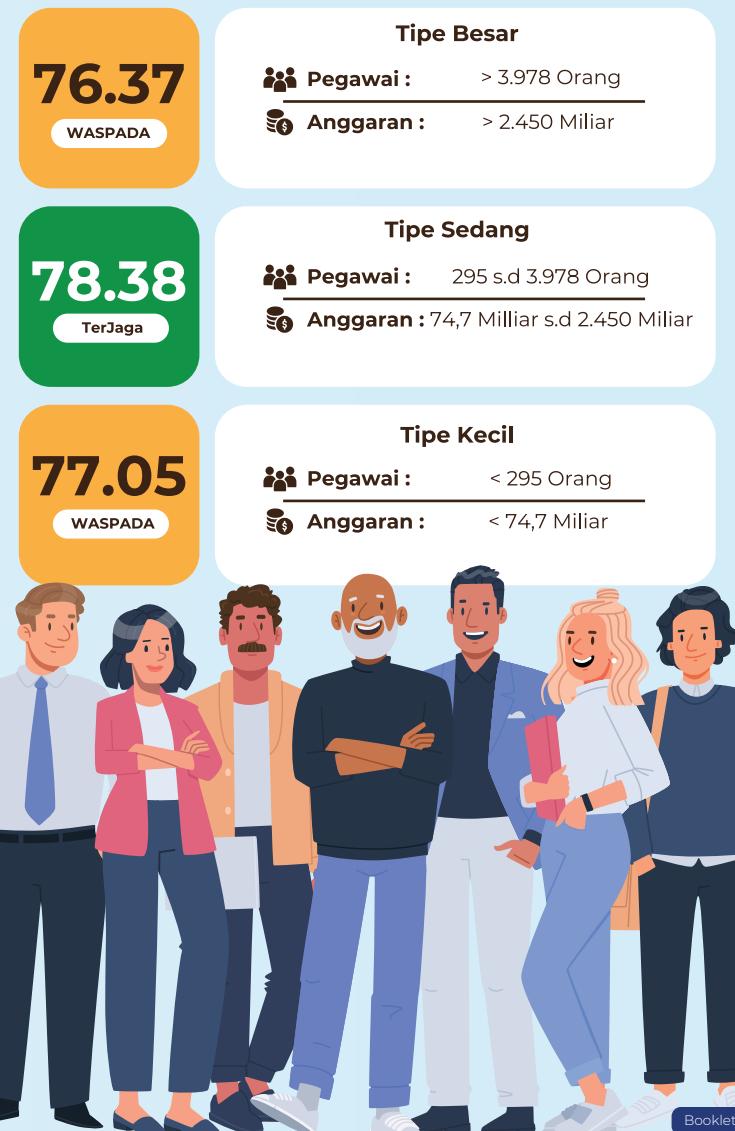
Potret Integritas Nasional (II)



Indeks per Tipe Kementerian



Indeks per Tipe Lembaga



Potret Integritas Nasional (II)

Rentan
(<73.00)

Waspada
(≥73.00 sampai < 78.00)

Terjaga
(≥78.00)

Indeks Integritas Bidang
Kementerian/Lembaga
Berdasarkan Mitra Komisi DPR

Bidang perdagangan dan pengawasan persaingan usaha berada di posisi paling rentan, menggambarkan lemahnya kontrol terhadap proses perizinan, pengawasan distribusi, dan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengaturan pasar.

Indeks per Tipe Kementerian

80.47

Badan Anggaran

Seluruh Kementerian Koordinator

79.56

Komisi VII

Bidang: Perindustrian dan UMKM, Pariwisata dan ekonomi kreatif, Sarana publikasi

79.52

Komisi XI

Bidang: Keuangan dan moneter, Perencanaan Pembangunan nasional, Sektor jasa keuangan

78.49

Komisi XII

Bidang: Energi dan sumber daya mineral, Lingkungan hidup, Investasi

77.63

Komisi I

Bidang: Pertahanan, Luar Negeri, Informatika

Potret Integritas Nasional (II)

Rentan
(<73.00)

Waspada
(≥73.00 sampai < 78.00)

Terjaga
(≥78.00)

77.45

Komisi XIII

Bidang: Regulasi reformasi dan HAM

76.63

Komisi IX

Bidang: Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial

76.53

Komisi VIII

Bidang: Agama, Sosial, Perempuan dan Anak

76.42

Komisi X

Bidang: Pendidikan, Olahraga, Sains dan Teknologi

75.91

Komisi III

Bidang: Penegakan Hukum

75.81

Komisi II

Bidang: Pemerintahan dalam negeri, Pertanahan, Pemberdayaan aparatur

75.20

Komisi V

Bidang: Infrastruktur dan Perhubungan

74.82

Komisi IV

Bidang: Pertanian, Kehutanan dan Kelautan

72.78

Komisi VI

Bidang: Perdagangan, Kawasan perdagangan, Pengawasan persaingan usaha dan BUMN

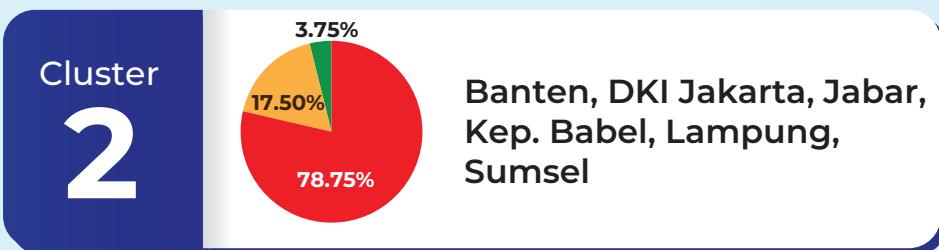
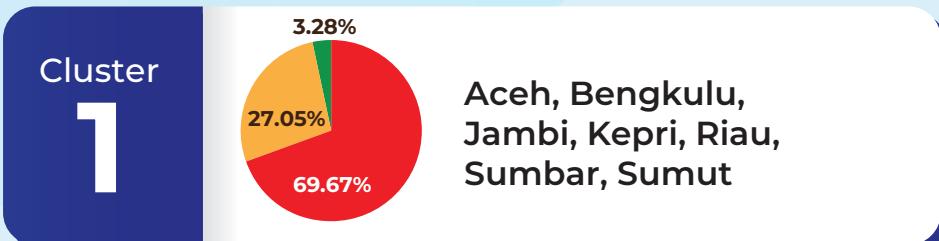
Potret Integritas Nasional (III)

Rentan
(≤73.00)

Waspada
(≥73.00 sampai < 78.00)

Terjaga
(≥78.00)

Indeks per Wilayah



Indeks per Tipe Provinsi



Tipe Besar
Pegawai : 6.42 s.d 19.85 ribu
Anggaran : 10.8 s.d 81.73 triliun



Tipe Sedang
Pegawai : 1.13 s.d 7.04 ribu
Anggaran : 2.58 s.d 20.1 triliun



Tipe Kecil
Pegawai : 0.99 s.d 2.79 ribu
Anggaran : 1.53 s.d 2.95 triliun

Indeks per Tipe Kota



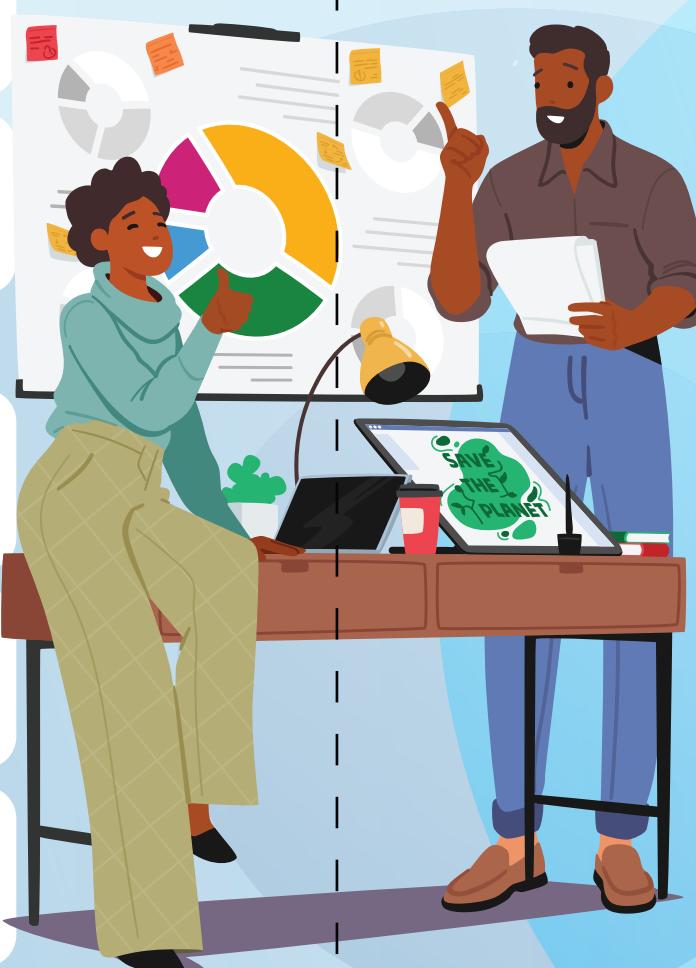
Tipe Besar
Pegawai : 2.1 s.d 4.51 ribu
Anggaran : 2.39 s.d 12.14 triliun



Tipe Sedang
Pegawai : 1.01 s.d 2.59 ribu
Anggaran : 0.58 s.d 4.67 triliun



Tipe Kecil
Pegawai : 0.93 s.d 1.25 ribu
Anggaran : 0.57 s.d 0.94 triliun



Indeks per Tipe Kabupaten



Tipe Besar
Pegawai : 1.9 s.d 5.58 ribu
Anggaran : 2.44 s.d 11.5 triliun



Tipe Sedang
Pegawai : 0.01 s.d 3.59 ribu
Anggaran : 0.73 s.d 4.97 triliun



Tipe Kecil
Pegawai : 0.41 s.d 1.18 ribu
Anggaran : 0.59 s.d 1.11 triliun

Dimensi SPI dan Pelacakan Indeks 2021-2025

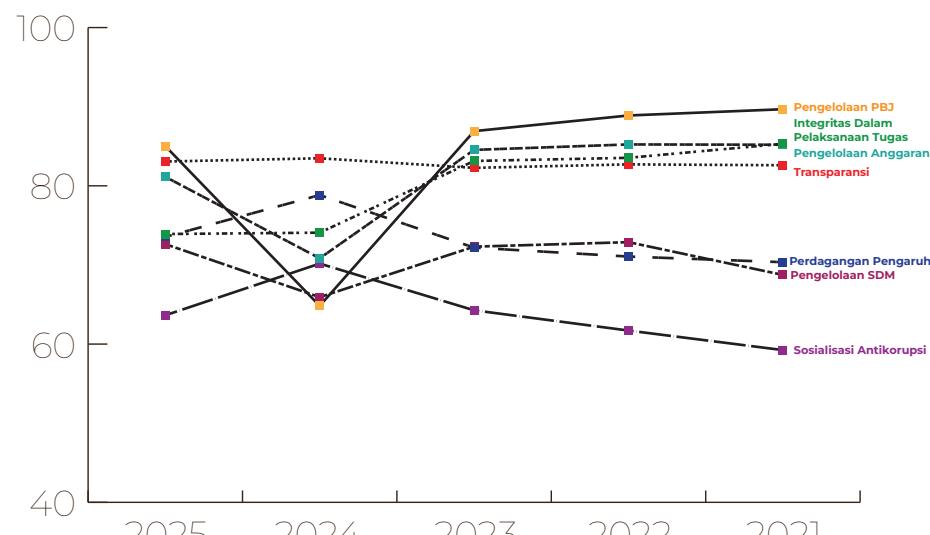
- • • •

Rentan
(<73.00)

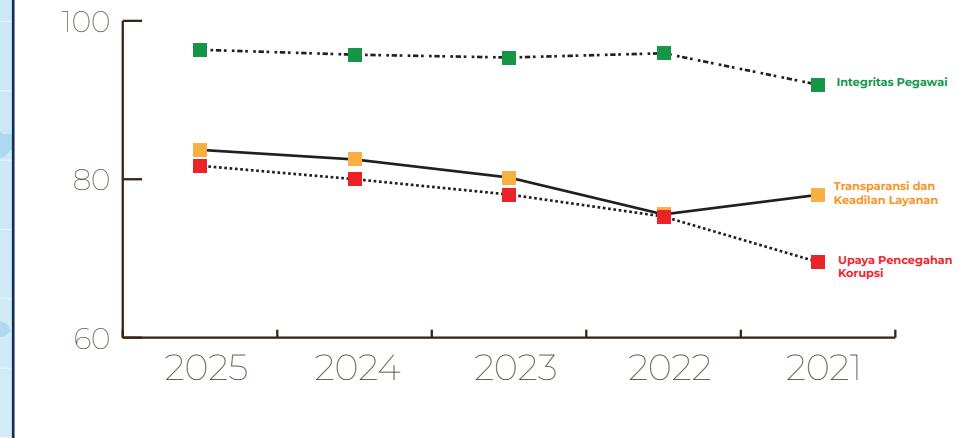
Waspada
(≥73.00 sampai < 78.00)

Terjaga
(≥78.00)

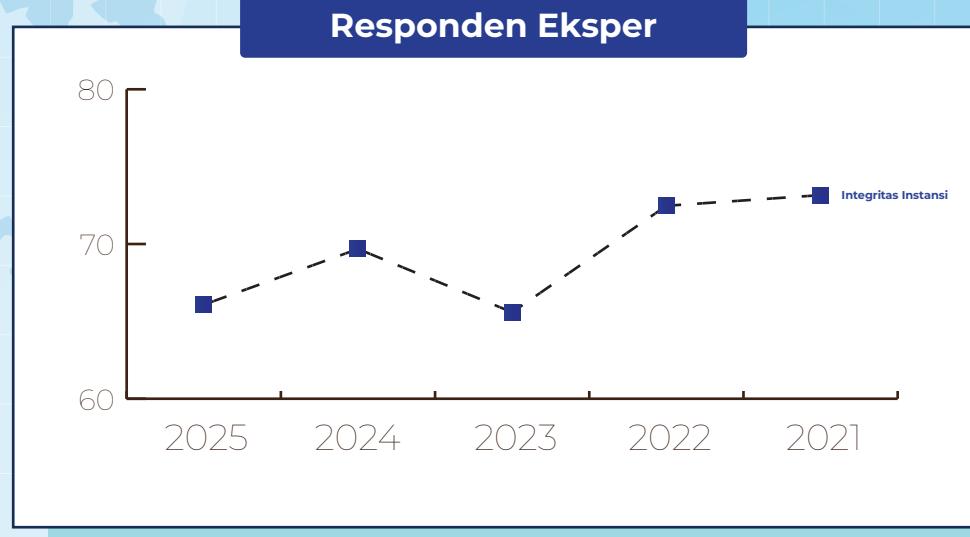
Responden Internal



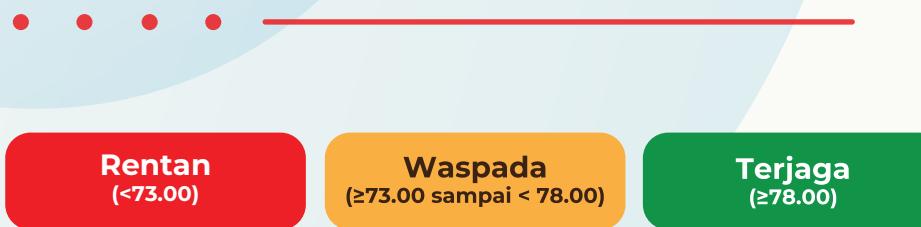
Responden Eksternal



Responden Eksper



Indeks Integritas per Dimensi pada Setiap Tipe Instansi



Menurut responden internal, Sosialisasi Antikorupsi, Pengelolaan SDM, Integritas dalam Pelaksanaan Tugas, dan Perdagangan Pengaruh berada pada area RENTAN dan memerlukan atensi tindak lanjut yang lebih nyata.

Responden Internal



Responden Eksternal



Responden Eksper



#Faktanya...



Generasi mana sih yang menghadapi risiko korupsi paling bikin geleng-geleng kepala tahun ini?
(Spoiler: Gen Z beda sendiri!)

Gen Z



Risiko 23% mengemuka: muncul persepsi bahwa pejabat masih memanfaatkan anggaran kantor untuk urusan pribadi.

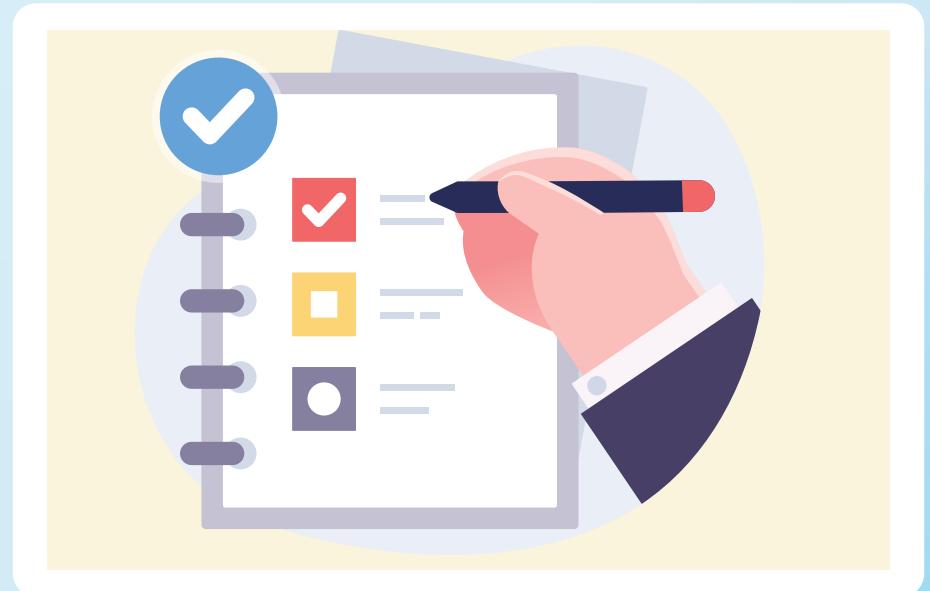
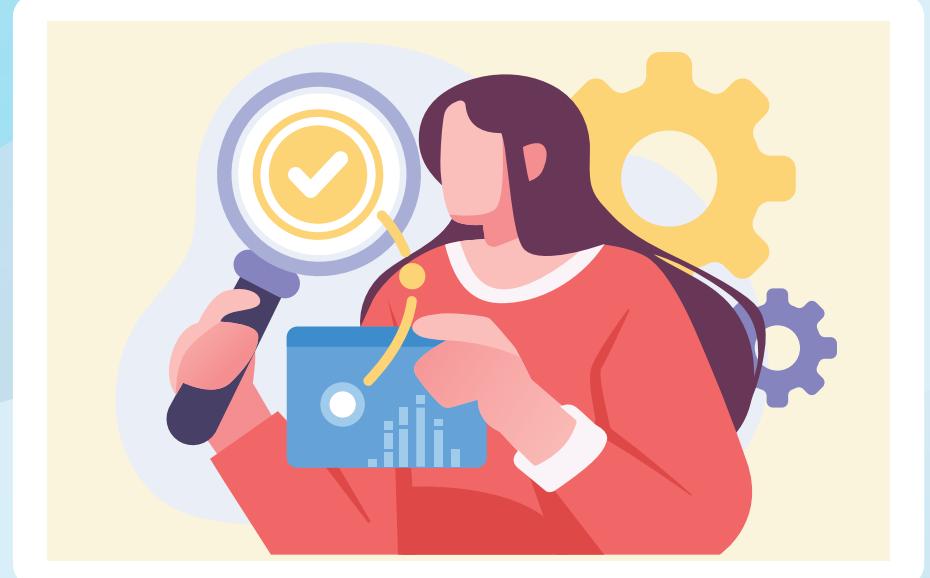
Gen X, Y, dan Baby Boomer



Menyatakan bahwa ada risiko 35%-38% keputusan dalam pelaksanaan tugas masih dipengaruhi oleh kedekatan suku, agama, keluarga, atau almamater.

Bagian 4

Highlight



Highlight Internal

Integritas dalam Pelaksanaan Tugas

Fasilitas kantor jadi 'serbaguna & milik pribadi'?

58%

pegawai memakainya untuk kepentingan pribadi **tanpa kecuali**, semua generasi ikut ambil bagian.

Integritas dalam Pelaksanaan Tugas

Keberadaan gratifikasi dalam promosi & mutasi

14%

Keberadaan Nepotisme Dalam Promosi & Mutasi



32%



33%



23%

Hubungan Kekerabatan

Kedekatan dengan Pejabat

Kesamaan Almamater/ Golongan/ Organisasi

Pengelolaan Anggaran



Pegawai mulai kehilangan kepercayaan terhadap ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran:

20%

Indikasi adanya pejabat yang menggunakan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi

11%

Indikasi adanya penyalahgunaan anggaran dalam proses PBJ

11%

Indikasi adanya pegawai yang membuat kuitansi, biaya transportasi, dan biaya lain dalam perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

10%

Indikasi adanya pegawai yang menerima honor/uang transport lokal/perjalanan dinas tidak sesuai dengan pertanggungjawaban yang ditandatangani

Bahkan para ahli menilai, ada risiko hingga 32% terkait rendahnya kualitas transparansi anggaran di instansi pemerintah. Perlu diingat, **1 is too many** untuk praktik korupsi!

Pengelolaan PBJ

Di 2025, risiko dalam pengelolaan PBJ masih menonjol. Isu pemilihan yang diatur, kualitas barang yang kurang sesuai, hingga kedekatan pemenang dan vendor tetap jadi perhatian. Hasil pengadaan juga dinilai belum optimal, menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih kuat.

Pemilihan diatur

42%

Kualitas barang tidak sesuai

44%

Pemenang punya hubungan kekerabatan

44%

Vendor memberikan sesuatu pada pihak terkait

38%

Hasil pengadaan tidak memberikan manfaat

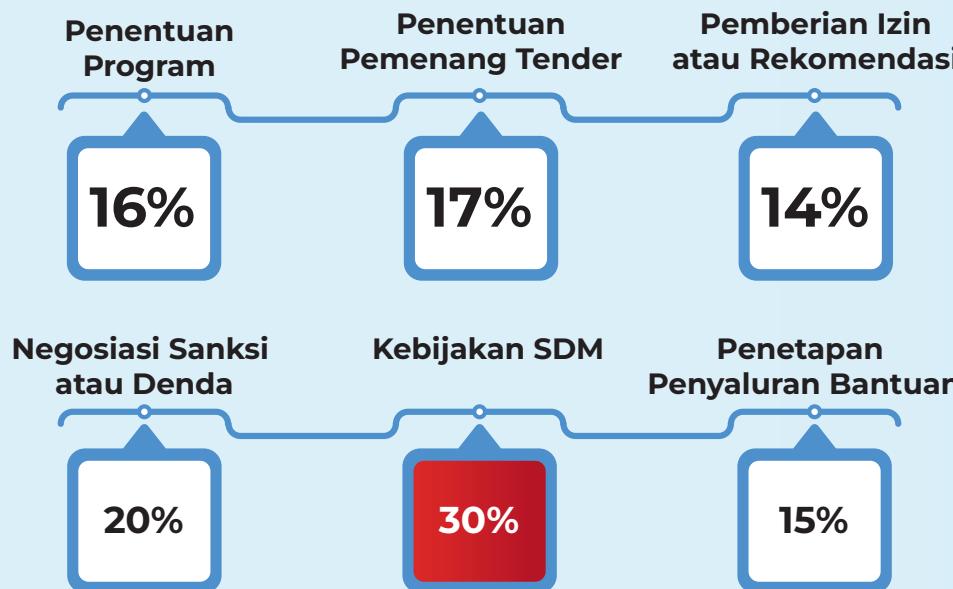
41%



Perdagangan Pengaruh

• • •

Dimensi Perdagangan Pengaruh, terlihat bahwa intervensi pihak luar masih cukup dominan dalam berbagai proses pengambilan keputusan di pemerintah daerah. Secara khusus, terkait kebijakan SDM menunjukkan peningkatan **sebesar 20%** dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10% untuk pengaruh pihak luar terhadap keputusan terkait rekrutmen pegawai non-ASN, promosi, rotasi, mutasi, dan diklat pegawai, menandakan bahwa aspek pengelolaan SDM merupakan area yang paling rentan terhadap praktik perdagangan pengaruh.



Sosialisasi Antikorupsi 2 dari 5

pegawai menyatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait **pelaporan gratifikasi**. Jumlah yang sama juga belum memperoleh **sosialisasi mengenai pelaporan suap**.

Bahkan, 1 dari 2

pegawai mengaku belum mendapatkan sosialisasi terkait **pelaporan tindak pidana korupsi yang mereka lihat, dengar, atau ketahui**.

Jangan biarkan pegawai berjalan tanpa kompas dalam melawan korupsi!

Transparansi

Dari perspektif internal, integritas dinilai cukup kuat: 90% pegawai melihat pelaku korupsi diproses sesuai ketentuan, 93% menilai pimpinan memberi teladan pencegahan korupsi, dan 94% merasakan hal yang sama dari atasan langsung. Temuan ini menunjukkan budaya antikorupsi sudah mulai diterapkan secara nyata dan kongkrit di level organisasi.



Highlight Eksternal



Transparansi dan Keadilan Layanan



Tren lima tahun menunjukkan pola yang sama dan belum ada perubahan nyata: risiko tinggi! Hal ini mengindikasikan bahwa alur pelayanan publik masih kompleks, informasi layanan belum tersampaikan dengan jelas, dan prosedurnya masih sulit diikuti.

“Bayangin: lima tahun berlalu, tapi risikonya tetap tinggi. Artinya satu hal—alur pelayanan publik kita masih ribet, informasinya nggak jelas, dan prosedurnya bikin orang nyerah duluan.”

Integritas Pegawai

Fakta bahwa penerima layanan masih diminta memberikan uang, barang, atau fasilitas tidak resmi menunjukkan bahwa praktik ini belum benar-benar terkendali. Kondisi ini patut menjadi alarm serius, mengingat level risikonya tetap bertahan pada level sedang.



Upaya Pencegahan Korupsi

• • •

22%

risiko yang muncul akibat belum tersedianya media pengaduan, pelaporan masyarakat, serta tidak ada perlindungan bagi pelapor korupsi



24%

risiko akibat tidak adanya kampanye atau himbauan antikorupsi =

CELAH BESAR

yang dapat membuka ruang terjadinya korupsi.



#Faktanya....

Bukan Suap, Katanya... Cuma 'Sungkan'.

Sebanyak **22%** pengguna layanan inisiatif mengaku pernah memberikan sesuatu kepada petugas sebagai bentuk 'terima kasih', rasa sungkan, atau untuk menjaga relasi. Padahal, tindakan ini jelas tidak sesuai ketentuan. Yang mengejutkan, justru Gen Z—kelompok yang dikenal kritis dan melek aturan—menjadi pelaku tertinggi praktik ini.

WHY
Oh
WHY?

#Faktanya....

**Persepsi Intervensi
Eksternal Tembus
30% dalam Setahun!**

Persepsi adanya pihak luar yang ikut mempengaruhi keputusan kepegawaian melonjak dari 10% di 2024 menjadi 30% di 2025. Kenaikan tajam ini menunjukkan bahwa isu yang dulu hanya terdengar sebagai “bisik-bisik”, kini mulai muncul sebagai **perhatian nyata di lingkungan pegawai**.



Highlight Eksper



Para ahli menegaskan bahwa pekerjaan rumah untuk memperkuat integritas masih sangat besar dan banyak celah belum tertutup dan perbaikan masih jauh dari kata selesai.

2021 2022 2023 2024 2025

Praktik Suap	sedang	sedang	sangat tinggi	sedang	sangat tinggi
Praktik Pungli	sedang	sedang	sangat tinggi	sedang	sangat tinggi

Setelah sempat mereda di level Sedang pada 2024, praktik suap dan pungli justru kembali menanjak ke kategori **Sangat Tinggi** di 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa layanan publik bukan hanya rentan, tetapi kini berada dalam kondisi yang semakin rawan dan membutuhkan intervensi serius.

Konflik Kepentingan	tinggi	sedang	sangat tinggi	rendah	sangat tinggi
---------------------	--------	--------	---------------	--------	---------------

Risiko berada pada level **Sangat Tinggi** kembali melonjak di 2025, mencerminkan bahwa mekanisme pencegahan konflik kepentingan belum benar-benar membumi, masih di awang-awang.

2021 2022 2023 2024 2025

Transparansi Layanan Publik	tinggi	tinggi	sangat tinggi	sedang	sangat tinggi
Intervensi Pihak Lain	tinggi	tinggi	sangat tinggi	sedang	sangat tinggi
Kualitas Transparansi Anggaran	tinggi	tinggi	sangat tinggi	sedang	sangat tinggi
Kualitas Transparansi dan Akuntabilitas PBJ	tinggi	tinggi	sangat tinggi	sedang	sangat tinggi

Indikator transparansi dan intervensi berada pada **Sangat Tinggi**, menegaskan bahwa upaya keterbukaan belum cukup kuat untuk menahan tekanan intervensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi yang diterapkan belum konsisten, belum mengakar, dan belum mampu menghasilkan perubahan yang benar-benar bertahan.

Objektivitas Kebijakan Manajemen SDM	tinggi	tinggi	tinggi	sedang	sangat tinggi
Kemampuan Mendeteksi Korupsi Internal	tinggi	tinggi	tinggi	sedang	sangat tinggi

Objektivitas kebijakan SDM dan kemampuan mendeteksi korupsi internal masih mandek tanpa perbaikan berarti. Risiko tetap tinggi, menandakan bahwa sistem pengendalian belum bekerja efektif dan titik rawan korupsi masih terbuka lebar.



Apa kata Eksper yang paling menonjol tahun ini?

Pandangan para ahli melonjak dari **18% (2024)** ke **65% (2025)** dalam melihat potensi intervensi pihak lain. Lonjakan ini menunjukkan kewaspadaan yang jauh lebih tinggi terhadap campur tangan pihak lain tahun ini sebanyak **47%**.



#Faktanya...

Apa kata Eksper yang paling menonjol tahun ini?



Pandangan para ahli melonjak dari 18% (2024) ke 65% (2025) dalam melihat potensi **intervensi pihak lain**. Lonjakan ini menunjukkan kewaspadaan yang jauh lebih tinggi terhadap campur tangan pihak lain tahun ini sebanyak **47%**.

Highlight **Renaksi Tindak Lanjut**

Eitsss, tidak semua yang disampaikan SPI bernilai negatif kok—justru ada kabar baik di baliknya. SPI bukan hanya memotret kondisi integritas, tetapi juga menghadirkan rekomendasi nyata untuk perbaikan. Rekomendasi tersebut telah dituangkan ke dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL), yang menjadi pijakan penting untuk memastikan setiap pemangku kepentingan terus bergerak, memantau komitmen, dan memperkuat sistem integritas di lembaganya masing-masing.

Yang lebih menggembirakan, pada tahun 2025 agenda ini mulai berjalan secara lebih sistematis dan menyeluruh, dengan progres perbaikan yang terlihat semakin nyata dan signifikan. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat komitmen instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi SPI—baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Kementerian/Lembaga/BUMN. Data berikut menunjukkan bagaimana mayoritas instansi bukan hanya menyatakan komitmen, tetapi juga benar-benar bergerak, memperbaiki area rentan, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak pidana korupsi.



Pemerintah
Daerah

99%

536 dari 543

Kementerian,
Lembaga, dan BUMN

99%

103 dari 104

Mayoritas instansi benar-benar berkomitmen memperbaiki area yang rentan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak pidana korupsi

84%

456 dari 543

94%

98 dari 104

Sebagian besar instansi serius dan berkomitmen. Dibuktikan dengan penyampaian renaksi dan dokumen pendukung yang tepat waktu

90%

86%

Rata-rata kelengkapan data dukung yang diberikan, dari seluruh instansi yang menyusun RTL.